



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 37 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 22 TAHUN
2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2015**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam tahun berjalan terdapat perkembangan yang tidak sesuai rencana awal yang menyangkut kerangka ekonomi dan pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, pendapatan daerah, serta saldo lebih tahun sebelumnya sehingga perlu merubah RKPD Kota Bontang Tahun 2015 yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bontang Tahun 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 .

PEMERINTAH KOTA BONTANG
PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA SKPD KABIKOTA TAHUN 2015

Kode SKPD : 1.20.29

Nama SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	NAMA	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				CATATAN	
					7	8	9	BERTAMBAH / BERKURANG)		
1										
2	3	4	5	6	7	8	9	10=9-8		11
1.19	<u>Urusan Walib</u>				APBD	0	1.397.295.000	1.397.295.000		
1.19.22	<i>Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</i>				APBD	0	987.890.000	987.890.000		
1.19.22.07	PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana Alam	Tersedianya peralatan dan bantuan pemakaman bagi korban bencana	Kota Bontang	1 paket (100%)	APBD	0	987.890.000	987.890.000		0
1.19.22.09	Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Kegiatan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana dapat terlaksana	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	129.460.000	129.460.000		
1.19.22.10	Fasilitasi Kedaruratan Logistik	Ketersediaan logistik	Kota Bontang	1 paket (100%)	APBD	0	246.020.000	246.020.000		
1.19.22.11	Pengadaan Saran dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Tercapainya waktu tanggap sesuai SPM	Kota Bontang	1 paket (100%)	APBD	0	216.460.000	216.460.000		
1.19.22.12	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan Pencegahan Kebakaran	Jumlah petugas PMK yang dikutsertakan pada diklat teknis pemadam kebakaran	Kota Bontang	1 paket (100%)	APBD	0	121.915.000	121.915.000		
1.19.22.13	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Terlaksananya penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran; Terlaksananya inspeksi peralatan PMK pada gedung/bangunan perkantoran dan permiaagan	Kota Bontang	1 paket (100%)	APBD	0	106.835.000	106.835.000		
1.19.22.14	Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Terlaksananya penanganan kasus kebakaran; Terlaksananya Simulasi Penanganan Kebakaran	Kota Bontang	1 paket (100%)	APBD	0	115.250.000	115.250.000		
1.19.22.15	Inspeksi dan penerikan Retribusi Bidang PMK		Kota Bontang	1 paket (100%)	APBD	0	51.950.000	51.950.000		
1.20	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Ke				APBD		409.405.000	409.405.000		
1.20.49	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA				APBD		409.405.000	409.405.000		

KODE	NAMA	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF				CATATAN	
					7	8	9	BERTAMBAH / BERKURANG (BERKURANG)		
1					6					
2										
1.20.49.01	Rapat Koordinasi Kebencanaan	4 Terwujudnya koordinasi dan kerjasama pemerintah daerah, instansi vertikal pihak perusahaan dan FKDM se kota bontang	5 Kota Bontang	95%	APBD	0	211.400.000	10=9-8 211.400.000	11	
1.20.49.02	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bontang	Terciptanya kwaspadan masyarakat dalam mengantisipasi bahaya bencana	Kota Bontang	100%	APBD	0	98.720.000	98.720.000		
16 1.20.49.03	Pembuatan Laporan Daerah Rawan Bencana Tahunan	Tersedianya laporan rawan bencana	Kota Bontang	laporan (100%)	APBD	0	25.135.000	25.135.000		
1.20.49.04	Pemantauan Daerah Rawan Bencana	Tersedianya laporan keadaan potensi bencana	Kota Bontang	laporan (100%)	APBD	0	74.150.000	74.150.000		
x	Digunakan Bersama				APBD	0	3.928.564.433	3.928.564.433		
x.xx	Program-Kegiatan pada setiap SKPD				APBD	0	3.928.564.433	3.928.564.433		
x.xx.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN				APBD	0	2.079.494.433	2.079.494.433		
17 x.xx.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya kebutuhan material untuk administrasi keuangan	Kota Bontang	600 lembar(100%)	APBD	0	3.000.000	3.000.000		
18 x.xx.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	terpenuhinya kebutuhan penggunaan/pemakaian telepon, listrik, air, jasa TV kabel dan internet	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	28.850.000	28.850.000		
19 x.xx.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya perijinan KIR kendaraan 78 unit dan perpanjangan STNK serta pajak kendaraan bermotor untuk 70 kendaraan	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	3.400.000	3.400.000		
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor		Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	4.626.000	4.626.000		
20 x.xx.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Bontang	55 macam(100%)	APBD	0	87.139.000	87.139.000		
21 x.xx.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	terpenuhinya kebutuhan barang cetakan, ; terpenuhinya kebutuhan spanduk; Terpenuhinya kebutuhan baliho; Terpenuhinya kebutuhan Dokumentasi; Terpenuhinya Kebutuhan Dekorasi	Kota Bontang	30 jenis(100%); 40 buah(100%); 162 m2(100%)	APBD	0	79.348.000	79.348.000		
22 x.xx.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya alat alat elektronik dan listrik	Kota Bontang	9 jenis(100%)	APBD	0	3.800.000	3.800.000		
x.xx.01.013	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Iat Kantor	Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	413.820.000	413.820.000		
23 x.xx.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	tersedianya kebutuhan bahan bacaan dan surat kabar	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	6.750.000	6.750.000		

KODE	NAMA	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	7	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			CATATAN
						SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10=9-8	11
24 x.xx.01.016	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Bontang	25 macam(100%)	APBD	0	17.624.000	17.624.000	
25 x.xx.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan untuk kegiatan tertentu	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD		70.498.000	70.498.000	
26 x.xx.01.018	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan instansi/pihak terkait	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	501.000.000	501.000.000	
27 x.xx.01.019	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Tenaga pegawai kontrak dan tenaga kerja harian	Kota Bontang	411 orang(100%)	APBD	0	859.639.433	859.639.433	
x.xx.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR				APBD		1.453.200.000	1.453.200.000	
28 x.xx.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kota Bontang	1 paket(100%)	APBD	0	968.020.000	968.020.000	
x.xx.02.010	Pengadaan Meubelair	Tersedianya kebutuhan meubelair kantor	Kota Bontang	1 paket(100%)	APBD	0	197.960.000	197.960.000	
29 x.xx.02.023	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kebutuhan service ringan, rehab sedang/berat, penggantian suku cadang, BBM dan pelumas bagi kendaraan dinas/operasional	Kota Bontang	1 tahun(100%)	APBD	0	271.720.000	271.720.000	
30 x.xx.02.027	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	pemeliharaan peralatan gedung kantor	Kota Bontang	7 macam(100%)	APBD	0	25.500.000	25.500.000	
x.xx.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR				APBD		294.920.000	294.920.000	
31 x.xx.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Kerja Dinas Non PNS	Kota Bontang		APBD	0	147.460.000	147.460.000	
32 x.xx.03.005	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Pengadaan pakaian khusus (olah raga)	Kota Bontang	80 pegawai(100%)	APBD	0	147.460.000	147.460.000	
x.xx.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan SDM		100%	APBD	0	75.000.000	75.000.000	
52 x.xx.05.001	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Bontang	1 Tahun(80%)	APBD	0	75.000.000	75.000.000	
x.xx.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN				APBD	0	13.300.000	13.300.000	
33 x.xx.06.001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Laporan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan	Kota Bontang	2 dokumen(100%)	APBD	0	500.000	500.000	
34 x.xx.06.002	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Laporan keuangan semester 1 dan laporan prognosis semester II	Kota Bontang	1 dokumen(100%)	APBD	0	500.000	500.000	
35 x.xx.06.004	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen laporan keuangan SKPD Tahun 2015	Kota Bontang	1 dokumen(100%)	APBD	0	500.000	500.000	

1	2	3	4	5	6	7	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF			11
							8	9	10-9-8	
KODE	NAMA	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG	CATATAN		
37 x.xx.06.011	Penyusunan Laporan Akuntabilitas	Dokumen LAKIP SKPD Tahun 2014	Kota Bontang	1 dokumen(100%)	0	500.000	500.000			
36 x.xx.06.010	Penyusunan Renstra SKPD	Dokumen Renja SKPD Tahun 2015	Kota Bontang	1 dokumen(100%)	0	11.300.000	11.300.000			
x.xx.09	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Pelayanan Masyarakat	0	12.650.000	12.650.000			
36 x.xx.09.012	Penyusunan Profil SKPD		Kota Bontang	1 Dokumen(100%)	0	12.650.000	12.650.000			
TOTAL							5.325.859.433	5.325.859.433		

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Lampiran II : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 37 Tahun 2015
Tanggal : 15 Juli 2015
Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015**

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Sebagaimana telah dijabarkan pada Bab IV, prioritas pembangunan Kota Bontang tahun 2015 secara operasional akan dijabarkan melalui program dan kegiatan yang merupakan muatan utama pada Bab ini. Mengingat bahwa kebutuhan belanja pembangunan selalu melampaui kemampuan pendanaan yang tercermin dari perkiraan pendapatan daerah, maka program dan kegiatan yang dijabarkan di dalam Bab V ini merupakan hasil seleksidan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Strategis SKPD, kondisi sosial politik dan ekonomi, aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tahun 2014 dan penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Bontang.

Penyusunan rencana program dan prioritas kegiatan juga tidak lepas dari sinergitas program dan kebijakan nasional, provinsi Kaltim dan Pemerintah Kota Bontang yang dikemas dalam bentuk Program Pembangunan Berkeadilan yang meliputi : Pro Rakyat, Justice For All (Keadilan untuk Semua) dan MDG's (Millenium Development Goals/Tujuan Pembangunan Millenium). Bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, program pembangunan yang Pro Rakyat diuraikan lagi menjadi Program Pro Poor (Pengurangan Kemiskinan), Program Pro Job (Pengurangan Pengangguran), Program Pro Environment (Pembangunan Berwawasan Lingkungan) dan Program Pro Growth (pertumbuhan Ekonomi).

Dalam rangka mendukung pencapaian kebijakan pembangunan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015, Pemerintah Kota Bontang telah menyusun program-program pembangunan yang selaras dengan pencapaian kebijakan pembangunan tersebut. Dalam rangkaian proses Musrenbang tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014, telah disepakati program/kegiatan prioritas Pemerintah Kota Bontang yang dinyatakan selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015. Berdasarkan pertimbangan kemampuan Anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras akan diupayakan melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN, sharing antara APBD Provinsi dan APBD Kota Bontang, maupun melalui APBD Kota Bontang. Hal ini dapat disampaikan sebagaimana matrik berikut ini.

**USULAN PROGRAM / KEGIATAN KOTA BONTANG YANG SELARAS DENGAN PROGRAM PRIORITAS
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015**

PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS KOTA BONTANG	IDENTIFIKASI KEGIATAN KAB/KOTA	TARGET KEGIATAN	LOKASI (KECAMATAN)	KETERANGAN (ALASAN PEMILIHAN LOKASI)	USULAN PENDANAAN (Rp)			BL - SKPD KAB/KOTA (Rp)	
						BL SKPD PROV	BANKEU	APBN		
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Pembangunan Fasilitas Penunjang Autis Centre	Penyediaan fasilitas penunjang pelayanan						
			Revitalisasi bangunan Sekolah (Gedung SMPN 1)	Tersedianya gedung sekolah sesuai standar						
6	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan	Peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan setara (S1) 35 orang	BONTANG SELATAN	Revitalisasi puskesmas pada wilayah tersebut				
			Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan	Peningkatan sdm kualifikasi kesehatan masyarakat setara (S2) 8 (delapan) orang	BONTANG SELATAN	Revitalisasi puskesmas pada wilayah tersebut				
7	Program pengadaaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Program pengadaaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Pembangunan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Puskesmas rawat inap PONED Bontang Utara II (Lanjutan/Tahap II)	BONTANG UTARA	Membutuhkan peningkatan pelayanan				
8	Program pengadaaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Program pengadaaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Pembangunan Gedung RSUD Taman Husada	Penambahan ruang rawat inap dan pelayanan pemerkiksaan	BONTANG BARAT	Peningkatan kapasitas layanan rawat inap terkait peningkatan tipe RSUD				
			Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD	Tersedianya peralatan kesehatan RSUD	BONTANG BARAT	Peningkatan kapasitas layanan rawat inap terkait peningkatan tipe RSUD				
9	Program pembangunan jalan dan jembatan	Program pembangunan jalan dan jembatan	Pembangunan Jalan Lingkar Kompleks Pemerintahan Kota Bontang	Peningkatan kelancaran dan aksesibilitas dari dan ke Kompleks Pemerintahan	BONTANG SELATAN	Lokasi Pusat Pemerintahan				

			Pembangunan Jalan Lingkar Pesisir Kota Bontang	Meningkatnya Kelancaran Transportasi ke Pusat Kegiatan Ekonomi Kota Bontang	BONTANG BARAT	--				
			Pembangunan Jalan Lingkar Komplek Pememrintah Kota Bontang	Peningkat Kelancaran dan Aksesibilitas dari dan ke Komplekahan Pemerint	BONTANG SELATAN	Lokasi Pusat Kota				
10	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan Jalan Cipto Mangukusumo (Ex Jl. Pupuk Raya)	Meningkatnya kualitas Jalan dan aksesibilitas transportasi	BONTANG UTARA	Jalan tersebut membutuhkan perbaikan				
			Peningkatan Jalan Soekarno-Hatta	Meningkatnya kualitas Jalan	BONTANG SELATAN	Membutuhkan peningkatan akses menuju bandara dan perumahan korpri dan kawasan industri				
			Peningkatan Jalan Urip Sumoharjo	Meningkatnya kualitas Jalan	BONTANG SELATAN	Berkaitan akses menuju bandara dan perumahan korpri dan kawasan industri				
			Peningkatan Jalan Arief Rahman Hakim (Ex Jl Kayu Masi) Kelurahan Belimbing	Meningkatnya Kualitas Jalan dan Aksesibilitas transportasi	BONTANG UTARA	---				
11	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Normalisasi Sungai Bontang	Pengendalian Banjir	BONTANG UTARA	Lokasi DAS				
			Normalisasi Sungai Guntung	Pengendalian Banjir	BONTANG UTARA	Lokasi DAS				
			Peningkatan kapasitas danau Kanaan	Pengendalian Banjir	BONTANG BARAT	Lokasi danau				
			Pembangunan WTP 100 lt/dan DW Tanjung Laut Indah	Meningkatnya Kapasitas produksi air bersih	BONTANG SELATAN	Merupakan lokasi WTP				
12	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Pembangunan pengaman pantai Pulau Beras Basah	4 hektar	BONTANG SELATAN	merupakan lokasi pulau				
13	Program Pengendalian Banjir	Program Pengendalian Banjir	Pembangunan Bendungan Sukarahmat	Terbangunnya bendungan dan pengendalian banjir	BONTANG SELATAN	---				
14	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Pengawasan penataan baku mutu emisi atau gas buang	Indeks pencemaran udara	BONTANG SELATAN	lokasi sasaran kegiatan				

			Penyediaan Mobil Laboratorium	Pengadaan mobil lab lingkungan	BONTANG SELATAN	---				
			Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk	tutupan karang 2 hektar	BONTANG SELATAN	lokasi terumbu karang yang akan direhabilitasi				
17	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender	Peningkatan Peran Serta Perempuan	BONTANG SELATAN	--				
18	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Penyediaan komponen/instalasi listrik/penerangan BLK	sambungan listrik ke BLK						
			Pelatihan kewirausahaan bagi pemula	40 orang tenaga kerja	BONTANG SELATAN	lokasi sebaran peserta diklat				
			Pelatihan berbasis kompetensi	32 orang	BONTANG SELATAN	lokasi peserta pelatihan				
19	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	80 orang	BONTANG SELATAN	lokasi peserta pelatihan				
20	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Sosialisasi Berbagi Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	20 Perusahaan	BONTANG SELATAN	--				
			Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Industrial	20 Perusahaan	BONTANG SELATAN	--				
21	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Facilitasi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	Koperasi yang Unggulan an Sentral OVOOP	BONTANG SELATAN	Merupakan sentra UMKM				
			Bimbingan dan pelatihan kewirausahaan	Tersedianya wirausahawan baru	BONTANG SELATAN	Mencakup seluruh kecamatan				
23	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pelatihan kelembagaan bagi pengurus koperasi	Peningkatan kemampuan manajemen pengurus koperasi	BONTANG SELATAN	Mencakup seluruh kecamatan				
25	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Seleksi Penerimaan CPNS	Pemenuhan formasi pegawai	BONTANG SELATAN	Peningkatan pelayanan bagi masyarakat				

			Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Setiap pegawai terdata dengan baik					
26	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan Keseljahteraan Penyuluh	Jumlah Penyuluh Berkualitas 7 Orang	BONTANG SELATAN	Terdapat lokasi pertanian			
27	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan pelayanan perpustakaan daerah	Pengadaan kapal perpustakaan keliling	BONTANG SELATAN	Miripiki pemukiman di atas air yan sulit diakses dengan kendaraan			
			Penyediaan Mobil Perpustakaan Keliling dan Koleksi Buku	Pengadaan satu unit mobil perpustakaan keliling dan Koleksi Buku Bacaan	BONTANG SELATAN	--			
28	Program Peningkatan Keseljahteraan Petani	Program Peningkatan Keseljahteraan Petani	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis (Pengembangan Kawasan Hertikultural	Tersedianya Tabulan Pot Cabe Merah 4000 Pot dan Tabulan Pot Buah kelingking 1000 Pohon	BONTANG SELATAN	--			
29	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	pengadaan kultivator	BONTANG SELATAN	--			
30	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan	Tersedianya bantuan sapi 50 ekor	BONTANG SELATAN	--			
31	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan Fasilitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH)	Peningkatan sarana/prasarana	BONTANG BARAT	Lokasi RPH			
32	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	tersedianya Biogas 1 Unit	BONTANG SELATAN	Pemamfaatan Energi			
33	Program pengembangan destinasi pariwisata	Program pengembangan destinasi pariwisata	Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	1 unit obyek wisata	BONTANG SELATAN	--			
34	Program pengembangan perikanan tangkap	Program pengembangan perikanan tangkap	Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sarana Perikanan Tangkap	Tersedianya sarana bagi perikanan tangkap (30 Unit)					
			Kegiatan Pendampingan pada kelompok nelayan Perikanan Tangkap	Terbinanya kelompok nelayan perikanan tangkap					
			Pembangunan PPI/TPI Tanjung Limau	Tersedianya sarana pelelangan ikan					

			Peningkatan sumberdaya ikan Rehabilitasi Terumbu Karang	Pengadaan apartemen ikan 50 modul 5 hektar/fahun	BONTANG SELATAN	merupakan daerah konservasi/perlindungan ikan				
35	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Demploet Teknologi Budidaya Rumput Laut Kebun Bibit Rumput Laut	Tersedianya demplot rumput laut Tersedianya sumber bibit rumput laut	BONTANG SELATAN BONTANG SELATAN	Lokasi pembudidayaan rumput laut Lokasi pembudidayaan rumput laut				
			Pengadaan Sarana Produksi Budidaya Rumput Laut	tersedianya tempat penjemuran rumput laut	BONTANG SELATAN	Lokasi pembudidayaan rumput laut				
			Pengadaan Prasarana Budidaya Rumput Laut	tersedianya prasarana budidaya rumput laut						
38	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan Peralatan Mesin Jahit bagi keluarga miskin Fasilitasi usaha bagi keluarga miskin	tersedianya 100 Mesin Obras 20 dan Mesin Neci 20 KUBE	BONTANG SELATAN	Mencakup seluruh kecamatan				
39	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial untuk mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan			BONTANG SELATAN	lokasi sebaran keluarga miskin				
40	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang UMKM	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang UMKM	Fasilitasi Pembinaan UMKM	Penyediaan sarana pendukung bagi UMKM	BONTANG SELATAN	didaerah ini berkembang UMKM				
43	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Kesejahteraan Sosial	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan PMKS lainnya	50 Keluarga rawan sosial, ekonomi dan bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	BONTANG SELATAN	merupakan lokasi sebaran				
44	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kewirausahaan Perempuan	Jumlah Perempuan Miskin yang dilatih sebanyak 30 Orang	BONTANG SELATAN	--				
45	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Program Penanggulangan Kemiskinan bidang Sarana dan Prasarana Dasar Permukiman	Pembangunan Rumah Layak Huni	350 rumah layak huni	BONTANG SELATAN	Penyediaan Permukiman Layak bagi Warga Miskin				
46	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penyusunan RTBL Kota Bontang	Tersedianya RTBL 1,2 hektar	BONTANG UTARA BONTANG UTARA	Lokasi Penataan bangunan dan lingkungan				
			Pembangunan RTH Kota Bontang		BONTANG UTARA	Lokasi yang dibutuhkan untuk RTH				

48	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Program peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak	Pemenuhan salah satu Kalaster Hak Anak	Jumlah Anak Putus Sekolah kembali Sekolah	BONTANG SELATAN	-				
50	Program pembukaan ketertisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan	Program pembukaan ketertisolasian wilayah sektor transportasi darat, sungai, danau dan peyeberangan	Penyediaan rambu dan rambu penunjuk arah	Pengadaan Pagar Pendahu Petunjuk Jurusan (RPP) Portal 1 Unit	BONTANG SELATAN	Mencakup seluruh kecamatan				
			Pengadaan Pagar pengaman (Guard Rail) 80 Meter	Pengadaan Pagar pengaman (Guard Rail) 80 Meter	BONTANG SELATAN	Mencakup seluruh kecamatan				
54	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Program Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah	Pemberian stimulan bantuan modal usaha ekonomi produktif	10 remaja putus sekolah	BONTANG SELATAN	lokasi sebaran keluarga miskin				
JUMLAH										

Keterangan warna (Kolom 10, 11, 12, dan 13) :
 Rencana Sumber Pembiayaan Pembangunan

Pada Bab II dokumen RKPD ini dijelaskan bahwa Bontang Utara dikembangkan untuk kawasan industri berbasis kimia. Berkembangnya industri di Kecamatan Bontang Utara telah mendorong masyarakat cenderung bermukim di sekitar kawasan industri sehingga pertumbuhan penduduknya paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Pertambahan penduduk tersebut juga akan berbanding lurus dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana pemukiman serta akses ekonomi masyarakat. Pada tahun 2015 pemerintah Kota Bontang memprioritaskan pembangunan dan perbaikan infrastruktur permukiman serta fasilitas umum lainnya berupa sport center dan pasar Loktuan, pembangunan Puskesmas 24 jam di Loktuan dan pengembangan Pustu Bontang Kuala.

Untuk mempermudah lalu lintas barang dan penumpang maka pemerintah Kota Bontang mengupayakan beroperasinya pelabuhan Loktuan pada tahun ini serta menyelesaikan fasilitas utama berupa lokasi penumpukan barang dan pagar pembatas kawasan pelabuhan. Agar akses utama untuk keluar masuk industri dan kawasan pelabuhan berjalan lancar maka tahun 2015 direncanakan pembangunan jalan lingkar pesisir serta peningkatan Jalan Arif Rahman Hakim (Eks Jl. Kayu Mas) dan Jalan Cipto Mangunkusumo (Eks Jl. Pupuk Raya).

Sebagai pintu gerbang utama masuk ke Kota Bontang, Kecamatan Bontang Barat diarahkan untuk menjadi daerah penyangga di sekitarnya. Untuk menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Bontang maka pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah terus diupayakan dengan menambah bangunan RSUD, membeli alat-alat kesehatan baru, dan menyediakan fasilitas pendukung lainnya. Untuk mengendalikan banjir, penyediaan air baku, dan kawasan rekreasi bagi masyarakat, pemerintah juga melakukan pengerukan dan penataan danau Kanaan.

Dalam mewujudkan perannya sebagai daerah penyangga dan sesuai RPJPD Kota Bontang Tahun 2005 – 2025 serta RTRW Kota Bontang maka pemerintah Kota Bontang telah melakukan enclave terhadap sebagian kawasan hutan lindung Bontang di sekitar Jalan Soekarno Hatta dan Jl. S. Parman untuk dijadikan kawasan pemukiman, perniagaan dan pusat perkantoran bagi lembaga swasta. Sebagai kawasan pemukiman, maka pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan terus dilakukan. Pada tahun 2015 akan dilakukan pembangunan jembatan penghubung Kelurahan Kanaan dan Gn. Telihan, penurapan sungai di Kelurahan Telihan dan Kanaan, serta Pembangunan Pos Polisi untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Kecamatan Bontang Selatan merupakan memiliki wilayah administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil. Berdasarkan RTRW Kota, wilayah Kecamatan Bontang Selatan merupakan pusat pemerintahan Kota Bontang. Oleh karena wilayahnya yang sangat luas dibanding kecamatan lainnya maka pemanfaatan

ruangnya diarahkan pula untuk perluasan kawasan industri, pusat perekonomian masyarakat serta pusat pendidikan dan pelatihan.

Untuk mendukung perencanaan ruang tersebut maka tahun 2015 akan dilakukan pembangunan jalan menuju kawasan industri baru di Bontang Lestari, pemukiman karyawan PT. Pama, Balai Latihan Kerja dan Lokasi BontangTekno Park. Agar transportasi menuju pusat pemerintahan berjalan lancar maka dilakukan penurapan terhadap bagian-bagian jalan yang mengalami longsor melalui kegiatan Penanganan Longsoran jalan Soekarno-Hatta.

Dalam kaitannya dengan pengembangan ekonomi masyarakat, pemerintah Kota Bontang berusaha mengembangkan pasar Rawa Indah menjadi pasar modern. Selain akan menampung pedagang yang lebih banyak, pasar ini juga akan memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang hendak berbelanja. Dengan kondisi ini diharapkan volume perdagangan akan meningkat sehingga ekonomi masyarakat akan meningkat pula.

Untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kota Bontang tahun 2015, maka didalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan ini diusulkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp.1.913.267.144.849,- atau bertambah Rp.339.855.258.849,00,- dari target yang ditetapkan dalam RKPD 2015 sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp.1.573.411.886.000,-. Adapun rincian anggaran terhadap program dan kegiatan yang diprioritaskan pada masing-masing SKPD disampaikan sebagai berikut :

Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang
Nomor : 37 Tahun 2015
Tanggal : 15 Juli 2015
Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015**

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN ANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

Berdasarkan RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016, tahun 2015 merupakan tahun kelima dari RPJMD, tahun kelima merupakan tahun terakhir proses berkesinambungan dari proses empat tahun sebelumnya 2011 s.d. 2014. Pada periode ini kebijakan ekonomi daerah lebih diarahkan kepada pengembangan iklim investasi dan peluang usaha. Sejalan dengan kebijakan tersebut peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur masih tetap menjadi perhatian utama arah kebijakan pembangunan karena ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan salah satu prasyarat dalam mendorong tumbuhnya investasi.

Perekonomian Kota Bontang masih sangat didominasi oleh sektor industri pengolahan dimana sub sektor gas alam cair kontribusinya mencapai 90% dari total PDRB. Berdasarkan fakta tersebut, kebijakan pembangunan yang mampu mendorong dan megakselerasi tumbuhnya investasi menjadisangat perlu diupayakan untuk secara gradual mendorong berkembangnya sektor-sektor non migas secara lebih berkelanjutan. Sebagai daerah pemekaran baru, sektor-sektor diluar migas yang menunjukkan peningkatan kontribusinya secara relatif adalah sektor Bangunan dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sedangkan industri pengolahan sebagai kontributor terbesar dalam PDRB tanpa migas, masih sangat didominasi oleh industri pupuk dan kimia.

Dengan memperhatikan realitas tersebut, pertumbuhan ekonomi Kota Bontang menjadi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi produksi industri gas alam cair. Hal ini berimplikasi pada relatif tidak signifikannya stimulasi kebijakan pembangunan ekonomi melalui program-program pembangunan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bontang. Namun demikian sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional yaitu menciptakan Indonesia yang aman dan damai; menciptakan indonesia yang adil dan demokratis; dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kebijakan pembangunan secara terus-menerus berusaha menyeimbangkan setiap kebijakan dan langkah antara kebutuhan

untuk mendorong pertumbuhan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.

Berdasarkan tiga agenda besar pembangunan nasional, Pemerintah Kota Bontang telah menjabarkannya ke dalam visi, misi dan diimplementasikan dalam strategi dan kebijakan sampai dengan program dan kegiatan pembangunan. Sejalan dengan kerangka arah kebijakan pengembangan perekonomian di atas, percepatan pembangunan ekonomi Kota Bontang di dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016 dijabarkan dalam beberapa kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur daerah berupa jalan dan jembatan.
2. Percepatan pembangunan sarana transportasi keluar masuk Bontang berupa pembangunan pelabuhan dan bandara.
3. Meningkatkan ketersediaan air bersih dan listrik.
4. Mendorong pengembangan sektor riil melalui penambahan skill dan akses permodalan bagi pelaku ekonomi
5. Pengembangan ekowisata pesisir, wisata budaya dan wisata kuliner.
6. Pengembangan pusat perekonomian masyarakat berupa pasar-pasar tradisional maupun pasar modern.
7. Pelestarian dan perbaikan lingkungan hidup.
8. Perluasan akses pasar (lokal, regional, nasional dan internasional) untuk pemasaran produk Kota Bontang

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan 2014

A. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun bersangkutan terhadap tahun sebelumnya dan merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun.

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dicerminkan dari beberapa indikator makro. Salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi, dengan tolok ukur pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besarnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dari kemampuan daerah dalam mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia.

Memasuki semester kedua tahun anggaran 2015, terdapat beberapa penyesuaian terhadap sejumlah indikator makro ekonomi sebagaimana yang dicantumkan dalam RKPD tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2013 dengan mingas mengalami koreksi dari -6,81% menjadi -6,40, dengan demikian angka pertumbuhan tersebut menjadi relatif lebih tinggi dibandingkan dengan

pertumbuhan ekonomi yang dicantumkan dalam RKPD sebelum perubahan dan tentunya lebih tinggi pula dibandingkan dengan capaian tahun 2012 dimana pertumbuhan negatif mencapai -7,15%. Faktor penurunan produksi gas alam cair oleh PT. Badak NGL yang tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya, merupakan sumber utama pertumbuhan negatif tersebut.

Koreksi juga terjadi terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2013 tanpa migas, dimana pertumbuhannya menjadi 6,43 dari sebelumnya pada data sangat sementara dicatat sebesar 6,38 persen.

Tabel 3.1
Pertumbuhan Sektoral PDRB Kota Bontang
Atas Dasar Harga Konstan (Tahun 2000)
Tahun 2011-2013

No	Lapangan Usaha	2012	2013	
			Murni	Perubahan
1	Pertanian	2,18	2,68	7,44
2	Pertambangan dan Galian	-0,25	-0,12	-55,30
3	Industri Pengolahan	-8,45	-8,21	-7,71
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,52	3,74	3,83
5	Bangunan	4,88	5,36	5,01
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4,47	4,12	4,32
7	Pengangkutan dan Komunikasi	17,85	5,08	5,08
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	5,89	6,24	6,24
9	Jasa-Jasa	7,82	6,85	6,85
Pertumbuhan sektoral per tahun		-7,14	-6,81	-6,40
Pertumbuhan sektoral per tahun tanpa migas		6,20	6,38	6,43

Berdasarkan tabel 3.1 terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan yang berbasis pada pengolahan sumber daya alam pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan negatif atau kontribusinya terhadap PDRB lebih kecil dari tahun 2012. Sektor industri pengolahan sebagai penyumbang terbesar dalam PDRB masih mengalami pertumbuhan negatif yang cukup signifikan mencapai -7,71%. Hal ini disebabkan oleh tren penurunan produksi pengolahan gas oleh PT. Badak yang disebabkan menurunnya pasokan gas dari kilang-kilang di Kalimantan Timur. Sebaliknya, sektor-sektor tersier umumnya mengalami pertumbuhan positif meskipun secara relatif mengalami pelambatan dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2012. Sektor Jasa-jasa diperkirakan mengalami pertumbuhan paling signifikan pada tahun 2013 yang mencapai 6,85%. Namun demikian tingkat pertumbuhan ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2012, dimana sektor ini tumbuh 7,82%. Pertumbuhan sektor ini mencerminkan berkembagnya ekonomi perkotaan.

Ditinjau dari struktur distribusinya terlihat dengan jelas bahwa industri pengolahan masih sangat mendominasi perekonomian Kota Bontang pada tahun 2013. Sektor ini berkontribusi lebih dari 89% terhadap PDRB Kota Bontang tahun 2013.

Tabel 3.2
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha
Kota Bontang Tahun 2011-2013 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2012	2013	
			Murni	Perubahan
1	Pertanian	0,15	0,16	0,16
2	Pertambangan dan Galian	0,27	0,29	0,06
3	Industri Pengolahan	89,42	88,08	89,46
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,08	0,09	0,08
5	Bangunan	5,60	6,33	5,76
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	2,53	2,83	2,53
7	Pengangkutan dan Komunikasi	0,69	0,78	0,69
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	0,71	0,81	0,71
9	Jasa-Jasa	0,55	0,63	0,55

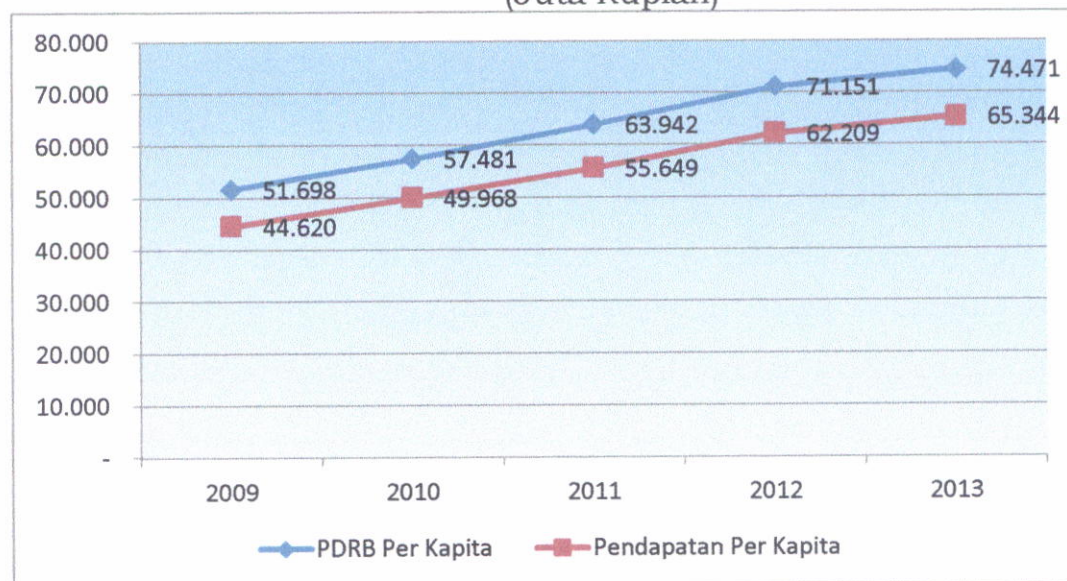
**Angka Sementara*

B. PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran yang dicapai oleh penduduk suatu daerah. Indikator ini menggambarkan nilai tambah yang dihasilkan per jiwa dalam satu entitas wilayah dalam satu tahun. Dengan mengurangkan penyusutan dan pajak tidak langsung, maka diperoleh pendapatan per kapita. Dengan penyajian secara berkala data pendapatan per kapita, selanjutnya dapat dilihat perubahan tingkat kemakmuran masyarakat daerah suatu daerah.

Untuk menunjukkan tingkat perbaikan kemakmuran masyarakat di Kota Bontang secara riil digunakan angka PDRB dan pendapatan per kapita tanpa migas. Dengan mengeluarkan unsur nilai tambah migas, PDRB dan pendapatan per kapita tidak lagi dipengaruhi oleh adanya fluktuasi baik produksi maupun harga migas.

Gambar 3.1
PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Tanpa Migas
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009 – 2013
(Juta Rupiah)



PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita selama lima tahun terakhir tanpa migas menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan sektor-sektor ekonomi masyarakat secara riil selama kurun waktu tersebut. PDRB per kapita Kota Bontang meningkat dari Rp.51,7 juta pada tahun 2009 menjadi Rp.74,47 juta pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan 44% dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sedangkan Pendapatan per kapita mengalami peningkatan 46,45% dalam kurun waktu yang sama.

Dengan memperhatikan tren peningkatan indikator makro ini, dapat diproyeksikan bahwa perekonomian masyarakat Kota Bontang akan cenderung terus mengalami peningkatan di masa yang akan datang.

C. Perkiraan Ekonomi Kota Bontang Tahun 2014 dan 2015

Berdasarkan koreksi pertumbuhan ekonomi tahun 2013 dan angka sementara pertumbuhan ekonomi Kota Bontang tahun 2014, terjadi koreksi/perubahan terhadap angka pertumbuhan ekonomi tahun 2014. Namun demikian untuk proyeksi pertumbuhan tahun 2015, dengan mengacu kepada beberapa asumsi ekonomi makro nasional saat ini perkiraan pertumbuhan tahun 2015 Kota Bontang masih dianggap relevan, sebagaimana diringkaskan pada tabel 3.3.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Bontang dengan migas tahun 2014 dan 2015 diproyeksikan masih mengalami pertumbuhan negatif cukup signifikan dengan asumsi kontribusi sektor industri migas masih akan mengalami penurunan. Masih sangat rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut sangat dipengaruhi oleh sektor Usaha Industri Pengolahan sebagai sektor yang masih sangat dominan dalam struktur ekonomi Kota Bontang. Penurunan produksi gas alam cair oleh PT. Badak NGL berpengaruh sangat besar terhadap kinerja sub-sektor industri pengolahan migas sebagai lapangan usaha penyumbang terbesar dalam perekonomian Kota Bontang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tanpa migas diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan berkisar 6% pada tahun-tahun tersebut.

Tabel 3.3
Proyeksi Perkembangan Indikator Makro Ekonomi
Kota Bontang Tahun 2012-2014

NO	Indikator Makro Ekonomi	Tahun 2014 Sebelum Perubahan	Tahun 2014 Setelah Perubahan	Tahun 2015 (**)	Tahun 2016 (**)
1.	Pertumbuhan PDRB (%)				
	- Dengan Industri Migas	-6,34	-4,14	-5,67	-5,30
	- Tanpa industri migas	7,09	7,28	5,85	5,63
2.	Tingkat Inflasi (%)	7,90	8,16	6,70	6,70
3.	Struktur PDRB Menurut Sektoral (%) (Harga Konstan 2000)				
	a. Pertanian	0,18	0,20	0,19	0,20
	b. Pertambangan dan Penggalian	0,31	0,08	0,32	0,34
	c. Industri Pengolahan	77,85	87,05	73,13	67,29
	c.1. Industri Migas	80,48	77,92	80,11	79,73

NO	Indikator Makro Ekonomi	Tahun 2014 Sebelum Perubahan	Tahun 2014 Setelah Perubahan	Tahun 2015 (**)	Tahun 2016 (**)
	c.2. Industri Non Migas	8,96	9,13	10,12	11,34
	d. Listrik Gas dan Air bersih	0,10	0,10	0,11	0,13
	e. Bangunan	7,02	7,11	7,76	8,52
	f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,12	3,07	3,43	3,76
	g. Pengangkutan dan komunikasi	0,87	0,85	0,98	1,09
	h. Keu, Persewaan dan Jasa Prsh	0,90	0,89	1,00	1,10
	i. Jasa-jasa	0,69	0,70	0,76	0,84
4.	Struktur PDRB Menurut Sektoral (Rp. Juta) (Harga Konstan 2000)				
	a. Pertanian	29.923,54	34.943,41	30.288,86	30.654,18
	b. Pertambangan dan Penggalian	52.311,15	4.946,11	51.929,63	51.548,10
	c. Industri Pengolahan	14.800.704,05	15.250.506,82	13.740.971,53	12.796.072,14
	c.1. Industri Migas	-	13.651.131,24	-	-
	c.2. Industri Non Migas	-	1.599.375,58	-	-
	d. Listrik Gas dan Air bersih	17.859,44	17.447,04	18.753,21	19.646,97
	e. Bangunan	1.196.979,75	1.245.691,32	1.274.375,62	1.297.771,06
	f. Perdagangan, Hotel dan Restoran	532.715,58	538.610,40	552.352,09	571.988,61
	g. Pengangkutan dan komunikasi	148.051,67	149.450,89	158.809,39	165.567,11
	h. Keu, Persewaan dan Jasa Prsh	152.817,70	156.042,89	160.083,95	167.350,19
	i. Jasa-jasa	117.559,46	122.533,90	122.890,23	128.221,01
5.	PDRB Per Kapita tanpa Migas atas dasar Harga Berlaku	79.755,80	90.581.294,30	85.040,21	90.342,63
6.	Ratio Pajak Terhadap PDRB (%)	0,09	0,12	0,11	0,11
7.	Ratio PAD terhadap PDRB (%)	0,22	0,21	0,22	0,21
8.	Ratio dana perimbangan terhdp PDRB (%)	1,25	1,38	1,52	1,44

(**) Angka Proyeksi

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan tahun 2015

Ditinjau dari sisi perkembangan ekonomi, salah satu tantangan dalam rangka pembangunan daerah Kota Bontang adalah bahwa secara internal, Kota Bontang sangat tergantung pada industri pengolahan migas. Dengan tren produksi migas yang cenderung menurun, maka Pemerintah Kota Bontang perlu melakukan pengembangan sektor-sektor lainnya untuk berusaha mensubstitusi peran sektor migas dimasa-masa mendatang.

Besarnya peran sektor migas juga sangat berdampak pada sisi pendapatan daerah, khususnya dana bagi hasil migas. Hal ini terkait dengan industri migas yang sangat fluktuatif mengikuti perubahan nilai tukar (*exchange rate*). Oleh karena itu perekonomian Kota Bontang untuk tahun 2014 dan 2015 tidak lepas dari situasi perekonomian nasional yang dipengaruhi oleh yaitu nilai tukar.

Pada bidang kependudukan, Kota Bontang menghadapi permasalahan pesatnya pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan penduduk ini disamping disebabkan oleh meningkatnya angka kelahiran, juga disebabkan relatif tingginya angka migrasi penduduk ke Kota Bontang. Sebagai daerah cluster industri kimia, Kota Bontang menjadi daya tarik tersendiri bagi angkatan kerja di seluruh Indonesia untuk mencari pekerjaan baik pada sektor industri maupun sektor-sektor penunjang yang melayani kebutuhan sektor industri tersebut. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi

pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dengan melakukan program-program yang dapat menstimulasi tumbuhnya investasi dan lapangan kerja baru, serta dengan memfasilitasi upaya peningkatan daya saing tenaga kerja dan bantuan modal usaha bagi pengusaha kecil.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi pada prinsipnya merupakan salah satu potensi ekonomi yang dapat mendorong meningkatnya permintaan barang dan jasa, namun demikian pertumbuhan penduduk ini harus disertai dengan peningkatan pendapatan. Berdasarkan tren peningkatan pendapatan Per Kapita Kota Bontang sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka, perekonomian Kota Bontang pada tahun 2014 dan 2015 cukup menjanjikan bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bontang. Akan tetapi Pemerintah Kota Bontang masih dihadapkan pada tantangan untuk terus mengupayakan peningkatan iklim investasi yang lebih baik. Dalam kaitan tersebut kebijakan pembangunan dalam rangka penyediaan infrastruktur maupun pelayanan-pelayanan lainnya yang dapat meningkatkan daya tarik Kota Bontang di mata investor perlu terus ditingkatkan.

Setidaknya terdapat tiga tantangan utama yang harus dapat diupayakan pada tahun 2015 untuk mendukung peningkatan iklim investasi di Kota Bontang. Pertama adalah peningkatan kapasitas sumberdaya baik air maupun listrik. Ketersediaan kedua sumberdaya ini mutlak dibutuhkan baik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun untuk pendukung bagi sektor riil atau dunia usaha. Kedua adalah aksesibilitas. Transportasi ke dan dari Bontang ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur masih relatif terbatas pada satu alternatif moda transportasi dalam hal ini transportasi darat. Oleh karena itu perlu upaya-upaya strategis meningkatkan aksesibilitas dengan membangun infrastruktur moda transportasi baik laut maupun udara sehingga perekonomian Kota Bontang menjadi lebih terbuka dimasa yang akan datang. Ketiga adalah ketersediaan lahan bagi pengembangan sektor industri baru atau kawasan industri.

Ketiga prasarana tersebut merupakan insentif-insentif yang seharusnya tersedia dengan cukup memadai bagi tumbuhnya investasi di daerah, disamping juga perlu terus diperbaiki sistem birokrasi pelayanan bagi sektor-sektor dunia usaha. Upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terutama jaringan transportasi, jalur perhubungan laut, penyediaan sumber air bersih dan pemenuhan kebutuhan energi yang didukung kondisi aman Kota Bontang diharapkan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk berinvestasi di Kota Bontang. Dengan demikian, tenaga kerja dapat terserap sehingga masalah kemiskinan maupun tenaga kerja dapat dikelola dengan baik.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu, dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kota Bontang pada tahun 2015 secara umum diarahkan:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan tahun 2015 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan (*sustained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
2. Kebijakan belanja pada APBD Kota Bontang digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program prioritas, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan tahun 2015
3. Kebijakan pembiayaan tahun 2015 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.

Kebijakan belanja daerah Kota Bontang tahun 2015, selain untuk pemenuhan layanan dasar masyarakat terutama diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan ekonomi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016. Adapun arah kebijakan ekonomi tahun 2015, dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan pembangunan sarana transportasi berupa jalan raya dan bandar udara serta pengoperasian pelabuhan umum untuk memperlancar arus penduduk dan barang dari dan ke Kota Bontang.
- b) Pengembangan pusat-pusat perekonomian masyarakat berupa pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar modern.
- c) Penciptaan iklim yang kondusif, penyediaan infrastruktur serta pemenuhan kebutuhan energi dan air bersih guna menarik minat investor lokal maupun asing ke Kota Bontang.
- d) Peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan jiwa kewirausahaan.
- e) Pembinaan dan pengembangan akses permodalan bagi usaha kecil menengah dan koperasi.

Alokasi dana belanja daerah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung SKPD dan belanja tidak langsung, dengan memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan yaitu: belanja pegawai, belanja bunga, dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan termasuk di dalamnya belanja modal yang dialokasikan secara tahun jamak (*multi years*) yang harus dialokasikan pada tahun 2015.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah, serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kota Bontang.

Pendapatan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalau mengalami kenaikan, akan tetapi porsi terbesar dalam pendapatan daerah di Kota Bontang masih bersumber pada dana perimbangan khususnya dana bagi hasil migas, sehingga tingkat ketergantungan daerah kepada produksi migas masih relatif tinggi. Kondisi ini tentu harus disikapi secara bijak, serta terus memacu peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah sehingga secara bertahap akan dapat mengurangi tingkat ketergantungan keuangan yg bersumber dari dana bagi hasil migas dan dana perimbangan lainnya dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan terbitnya peraturan perundang-undangan baru tentang perpajakan yang menyerahkan beberapa kewenangan memungut pajak kepada daerah, maka memberikan peluang bertambahnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bontang.

Peningkatan pendapatan dari sektor PAD di tahun 2013 dan 2014 memberikan sinyal yang menggembirakan, namun peningkatan yang terjadi dirasakan masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena sebagian potensi pajak masih harus terus dilakukan validasi, sehingga dapat memberikan kontribusi perhitungan pajak yang maksimal.

Terhadap kondisi ekonomi daerah dan kajian tantangan serta prospek perekonomian daerah, maka berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi pendapatan daerah hingga semester pertama 2015, selanjutnya dilakukan perubahan terhadap target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target Pendapatan Kota Bontang Tahun 2015 Perubahan

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan asli daerah	109.607.500.000,00	138.282.103.999,47	28.674.603.999,47	26,16
1.1.1	Pajak daerah	50.275.000.000,00	57.430.000.000,00	7.155.000.000,00	14,23
1.1.2	Retribusi daerah	4.302.500.000,00	4.970.600.000,00	668.100.000,00	15,53
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	00	00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	47.030.000.000,00	67.881.503.999,47	20.851.503.999,47	44,34

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ (Berkurang)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.2	Dana perimbangan	1.042.576.776.000,00	1.190.415.757.490,00	147.838.981.490,00	14,18
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	889.391.000.000,00	981.850.731.490,00	92.459.731.490,00	10,40
1.2.2	Dana alokasi umum	153.185.776.000,00	104.682.726.000,00	-48.503.050.000,00	-31,66
1.2.3	Dana alokasi khusus	0	103.882.300.000,00	103.882.300.000,00	
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	304.481.110.000,00	246.047.365.050,00	-58.433.744.950,00	-19,19
1.3.1	Hibah	0	-		
1.3.2	Dana darurat	0	-		
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	154.735.880.000,00	181.646.575.050,00	26.910.695.050,00	17,39
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	24.745.230.000,00	35.995.490.000,00	11.250.260.000,00	45,46
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	125.000.000.000,00	26.405.300.000,00	-98.594.700.000,00	-78,88
1.3.6	Penerimaan Lain-lain	0	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.456.665.386.000,00	1.574.745.226.539,47	118.079.840.539,47	8,11

Berdasarkan tabel 3.4 tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan Kota Bontang sebagian besar bersumber dari dana perimbangan, khususnya dana bagi hasil migas, diikuti oleh Pos Lain-lain Pendapatan yang Sah dan Pendapatan Asli Daerah pada urutan terakhir.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, Pemerintah Kota Bontang akan terus melaksanakan upaya-upaya dan strategi sebagai berikut:

- 1) Sektor Pajak Daerah dan Retribusi diharapkan memberikan kontribusi yang cukup tinggi dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk memaksimalkan sektor ini, perlu adanya dukungan peraturan daerah sebagai Landasan Hukum pemungutan yang kuat serta aparatur yang berkualitas dan kapabel dalam melakukan pemungutan.
- 2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan tanpa harus menambah beban kepada masyarakat. Dalam hal ini ditekankan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak dan retribusi sehingga iklim yang kondusif tetap terjaga untuk pengembangan dunia usaha.
- 3) Komponen Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sumber utama dalam Pendapatan Daerah Kota Bontang, sehingga upaya peningkatan koordinasi yang intensif dengan seluruh pihak yang terkait dalam rangka peningkatan penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mutlak untuk dilaksanakan.
- 4) Kemungkinan penurunan alokasi dari beberapa komponen Dana Perimbangan dibandingkan alokasi pada Tahun 2014, sebagai

konsekuensi logis dari menurunnya asumsi ekonomi makro yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

- 5) Peningkatan dari sektor Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi diperoleh dari adanya perubahan yang mendasar mengenai tarif maupun peningkatan alokasi bagi hasil, sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Untuk mencapai target yang pendapatan daerah, maka pemerintah daerah berupaya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a) Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan yang ditempuh Pemerintah Kota Bontang, antara lain :
- Meningkatkan jumlah penerimaan objek PAD melalui penggalan/perluasan sumber-sumber PAD yang produktif, ekstensifikasi dan kajian yang tidak menimbulkan biaya tinggi;
 - Melakukan perhitungan potensi PAD yang tersedia, baik menyangkut pajak daerah maupun retribusi daerah;
 - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang peranan dan fungsi PAD dalam pembangunan daerah;
 - Membuat sistem database wajib pajak dan retribusi yang valid dan komprehensif.
 - Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur prasarana dan sarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
- b) Untuk Dana Perimbangan, kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Bontang antara lain :
- Meningkatkan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan antara pemerintah Kota Bontang dengan Pemerintah Pusat
 - Memperjuangkan agar Kota Bontang tetap memperoleh Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.
 - Mempertimbangkan segala asumsi dan Peraturan-Peraturan yang ada dengan lebih cermat, sebagai acuan menentukan target dana perimbangan.
- c) Untuk Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, kebijakan yang ditempuh antara lain:
- Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk syarat memperoleh Dana Penyesuaian;
 - Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dalam rangka memperoleh alokasi Bantuan Keuangan yang dapat membiayai sebagian kegiatan pembangunan di Kota Bontang, serta dalam rangka peningkatan akurasi perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah sebagai suatu tatanan terhadap pengeluaran kas daerah yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran

diarahkan untuk keperluan belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Memprioritaskan proporsi belanja langsung yang lebih besar daripada belanja tidak langsung dan proporsi belanja modal yang lebih besar daripada belanja pegawai, merupakan salah satu kebijakan anggaran belanja yang terus diupayakan sebagai cerminan keberpihakan pengalokasian anggaran untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Melalui kebijakan seperti ini diharapkan alokasi anggaran pembangunan dapat secara langsung menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan berbagai pelayanan pembangunan.

Pada tahun 2015 anggaran belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp. 1.573.411.886.000,-, namun dalam RKPD Perubahan ini anggaran belanja ditetapkan dengan penambahan cukup signifikan menjadi sebesar Rp.1.913.267.144.849,- atau meningkat 21,6 persen. Alokasi belanja daerah ini sebagian besar dialokasikan melalui belanja langsung sebagai wujud dari kebijakan anggaran yang harus memprioritaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pada sisi belanja tidak langsung terjadi penyesuaian (berkurang) yaitu pada posisi Belanja Pegawai dan penambahan pada alokasi belanja hibah. Belanja pegawai dilakukan koreksi dan penyesuaian dengan besaran menjadi Rp.433.654.724.429,- atau mengalami pengurangan mencapai 8,3% dari pagu murni sebesar Rp.472.912.733.786,-. Besaran Belanja Pegawai ini mengacu pada prognosis dan realisasi belanja pegawai hingga semester pertama 2015. Sebaliknya belanja hibah mengalami penambahan menjadi Rp.63.002.491.000, atau mengalami penambahan sebesar Meskipun terjadi pengurangan pada alokasi belanja Rp.8.002.491.000,- dari pagu Murni yang ditargetkan sebesar Rp.55.000.000.000,-. Penambahan ini sebagian besar dialokasikan untuk pembiayaan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah serentak yang dijadwalkan dilaksanakan pada Bulan Desember 2015.

Penetapan alokasi belanja secara keseluruhan tetap memperhatikan program prioritas untuk pencapaian target kinerja walikota yang terdapat dalam RPJMD Kota Bontang tahun 2011-2016.

Belanja langsung dititikberatkan pada 6 program unggulan yang mencakup : (1) Pemenuhan Kebutuhan Listrik dan Air; (2) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan; (3) Program Rp. 50 Juta/RT; (4) Pengembangan Ekonomi Kerakyatan; (5) Peningkatan Lingkungan Hidup; (6) Komitmen Bersama.

Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari volume

anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan termasuk belanja modal yang telah ditetapkan dengan kontrak tahun jamak. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD serta belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2011-2015

NO	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	(%)
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
(1)	(2)	(7)			
2.1	Belanja Tidak Langsung	535.887.733.786,00	503.104.404.940,00	-32.783.328.846,00	-6,12
2.1.1	Belanja pegawai	472.912.733.786,00	433.654.724.429,00	-39.258.009.357,00	-8,30
2.1.2	Belanja bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja hibah	55.000.000.000,00	63.002.491.000,00	8.002.491.000,00	14,55
2.1.5	Belanja bantuan sosial	5.000.000.000,00	4.472.189.511,00	-527.810.489,00	-10,56
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dan Parpol	475.000.000,00	475.000.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja tidak terduga	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-1000.000.000,00	-40,00
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	535.887.733.786,00	503.104.404.940,00	-32.783.328.846,00	-6,12
2.2	Belanja Langsung	1.037.524.152.214,00	1.410.162.739.909,00	372.638.587.695,00	
2.2.1	Belanja pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Belanja modal	0,00	0,00	0,00	0,00
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.037.524.152.214,00	1.410.162.739.909,00	372.638.587.695,00	35,92
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	1.573.411.886.000,00	1.913.267.144.849,00	339.855.258.849,00	21,6

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya. Pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi maupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2015 disajikan dalam bentuk tabel dengan format sebagai berikut:

Tabel 3.6
Target Pembiayaan Daerah Tahun 2015 Perubahan

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah Rp.		Bertambah/ Berkurang
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
(1)	(2)	(7)		
3.1	Penerimaan pembiayaan	150.000.000.000,00	345.448.213.309,53	195.448.213.309,53
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA)	150.000.000.000,00	345.448.213.309,53	195.448.213.309,53
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0	0	
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	0	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0	0	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	150.000.000.000,00	345.448.213.309,53	195.448.213.309,53
3.2	Pengeluaran pembiayaan	33.253.000.000,00	6.926.295.000,00	-26.326.705.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	33.253.000.000,00	6.926.295.000,00	-26.326.705.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	0	0	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0	0	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	33.253.000.000,00	6.926.295.000,00	-26.326.705.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	116.747.000.000,00	338.521.918.309,53	221.774.918.309,53

Sumber utama Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015 diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Dengan demikian perkiraan penerimaan pembiayaan yang akan diterima pada tahun 2015 merupakan SiLPA tahun 2014. Perkiraan besarnya SiLPA harus diperhitungkan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan kinerja pelaksanaan anggaran dan berbagai faktor lainnya yang mempengaruhi realisasi APBD tahun berjalan. Pada tahun 2015 Penerimaan Pembiayaan dari SiLPA tahun 2014 berdasarkan hasil audit BPK adalah sebesar Rp.345.448.213.309,53 mengalami penambahan signifikan

dibandingkan angka perkiraan dalam RKPD sebelum perubahan yang mencapai Rp. 150.000.000.000,-. Besarnya SILPA tersebut menyebabkan Anggaran Belanja tahun 2015 setelah perubahan yang dapat dibiayai menjadi sebesar Rp. 1.913.267.144.849,- atau bertambah Rp.339.855.258.849,00,- dari target yang ditetapkan dalam RKPD 2015 sebelum perubahan yang ditetapkan sebesar Rp.1.573.411.886.000,-

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, pada tahun 2015 anggaran ini sepenuhnya dialokasikan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dengan besaran yang dalam RKPD sebelum perubahan direncanakan Rp.33.253.500.000,-, dalam RKPD Perubahan ini dikoreksi menjadi sebesar Rp.6.926.295.000,-. Anggaran tersebut direncanakan dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perusahaan Daerah. Selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan (Pembiayaan Netto) dialokasikan untuk menutupi defisit anggaran.

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA